

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Tipe A Kabupaten Minahasa Tenggara . Visi Badan Keuangan Daerah adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan Mandiri, dengan misi yaitu Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif dan Transparan sesuai ketentuan yang berlaku, Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas.

Badan Keuangan Daerah di pimpin oleh Seorang Kepala Badan dengan membawahi Sekretariat, dan 6 bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Barang Milik Daerah, Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dan Penagihan dan Keberatan.

Dalam mewujudkan visi, Badan Keuangan Daerah ditunjang oleh bidang-bidang yang secara spesifik menangani pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yaitu Bidang Anggaran yang membawahi sub bidang anggaran belanja langsung, sub bidang belanja tidak langsung dan sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang membawahi sub bidang pelaporan, sub bidang pengelolaan dan pengendalian kas dan sub bidang perbendaharaan, Bidang akuntansi dan Pelaporan yang membawahi sub bidang monitoring dan evaluasi, sub bidang akuntansi pelaporan aset tetap dan piutang dan sub bidang sub bidang akuntansi pelaporan kas,

kewajiban dan investasi, Bidang Aset yang membawahi sub bidang analisa kebutuhan, sub bidang pengamanan dan sub bidang investasi, Bidang Penagihan dan Keberatan yang membawahi sub bidang penagihan, sub bidang pemeriksaan, verifikasi pajak dan retribusi daerah, dan sub bidang keberatan dan pengurangan, Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah yang membawahi sub bidang pendaftaran, sub bidang penilaian dan sub bidang pengolahan data informasi.

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD), memiliki jumlah pegawai sebanyak 41 Pegawai negeri Sipil dan 43 Pegawai honorer.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi Badan Keuangan Daerah adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan Mandiri.

2. Misi

- Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif dan Transparan sesuai ketentuan yang berlaku
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan berintegritas.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

❖ Tujuan Pertama :

Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

❖ Tujuan Kedua

Adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas

❖ Tujuan Ketiga:

Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal dan berintegritas.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah :

- Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah

B. Penetapan Kinerja

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Sasaran 1:

Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	- Jumlah Buku standar biaya umum -Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD -Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD - Jumlah buku standar satuan harga -Jumlah Laporan	2 Buku 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Buku

			rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah	4 Laporan
			-Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
			- Jumlah Buku Analisa Standar belanja	1 Buku
			-Jumlah dokumen laporan semesteran barang milik daerah	2 laporan
			-Jumlah Laporan Persediaan Barang Milik Daerah	1 Laporan

Sasaran 2:

Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	Opini pemeriksaan BPK	-Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD -Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD -Prosentase	1 Dokumen 1 Dokumen

			Penyelesaian Laporan Utang dan Piutang daerah -Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan LKPD	100% 2 Laporan
--	--	--	--	-----------------------

Sasaran strategis 3:

Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah	Aparat pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang memahami aturan	-Aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah -Aparat yang memahami sistem akuntansi berbasis akrual	100 Org 129 Org

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis atas pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

Indikator Kinerja Utama : Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah

Target

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen

Indikator kinerja utama ini digunakan untuk melihat kesiapan dokumen pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, indikator ini juga digunakan untuk melihat dokumen-dokumen yang ada apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Untuk mewujudkan sasaran kinerja utama tersebut perlu didukung oleh indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
----	-------------------	--------	--------	-----------	---

1	Jumlah Buku standar biaya umum	Buku	2	2	100
2	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen	2	2	100
3	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100
4	Jumlah buku standar satuan harga	Buku	1	1	100
5	Jumlah Laporan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah	Jumlah laporan	4	4	100
6	Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100
7	Jumlah Dokumen Analisa Standar belanja	Dokumen	1	1	100
8	Jumlah dokumen laporan semesteran barang milik daerah	Laporan	2	2	100
9	Jumlah Laporan Persediaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100
	RATA-RATA CAPAIAN				100

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan dan

panatausahaan keuangan dan barang milik daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %.

1. Indikator kinerja : Buku standar biaya umum

Standar biaya masukan (SBM) atau disebut juga Standar biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam suatu wilayah.

Indikator ini digunakan agar supaya setiap barang dan jasa yang dianggarkan sesuai dengan aturan sehingga pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan data kinerja tahun 2017 yang tersaji menunjukkan bahwa target kinerja indikator ini tercapai. Bila dibandingkan dari tahun ke tahun maka perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

2. Indikator kinerja : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD

Indikator ini digunakan untuk melihat rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2017 yang tersaji menunjukkan bahwa target kinerja indikator ini tercapai. Bila

dibandingkan dari tahun ke tahun maka perbandingannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100 %		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

3. Indikator ini : Buku peraturan bupati tentang penjabaran APBD

Indikator tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran APBD dibuat setelah adanya peraturan daerah tentang APBD, indikator tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran APBD berisi rincian atau penjabaran pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Berdasarkan data kinerja tahun 2017 yang tersaji menunjukkan bahwa target kinerja indikator ini tercapai. Bila dibandingkan dari tahun ke tahun maka perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100 %		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

4. ,Indikator kinerja : Jumlah buku standar satuan harga

Indikator ini bertujuan agar tersedia suatu besaran harga yang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam satu periode.

Dengan adanya kenaikan harga sehingga mengharuskan penyesuaian untuk harga barang. Dengan adanya satuan standarisasi harga ini akan dapat menjadi patokan dalam pengadaan atau pembelian barang, sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan data kinerja tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa realisasi atas indikator ini adalah 100 %.

Bila dibandingkan dari tahun ke tahun, maka perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100 %		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

5. Indikator kinerja : Laporan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu bisa juga dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan pengadaan barang milik daerah

Indikator ini bertujuan untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat;

Dengan adanya pelaporan barang ini akan menunjang pengelolaan barang milik daerah yang benar dan bisa dijadikan

dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan data kinerja tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa realisasi atas indikator ini adalah 100 %.

Bila dibandingkan dari tahun ke tahun, maka perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada table berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100 %		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100 %	Tetap	Tetap

6. Indikator kinerja : Laporan Tahunan Barang Milik Daerah

Indikator ini bertujuan untuk menyajikan laporan barang milik daerah. Dengan indikator ini kita bisa mendapatkan informasi barang milik daerah secara keseluruhan.

Realisasi kinerja atas indikator Tersedianya laporan tahunan barang milik daerah adalah 100%.

Bila dibandingkan dari tahun ke tahun, maka perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada table berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100%	tetap	tetap
2016	100%	tetap	tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

7. Indikator kinerja : Jumlah dokumen analisa standar belanja

Indikator ini untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisa standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Realisasi kinerja atas indikator ini adalah sebesar 100 %. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	-		
2015	100 %	Peningkatan	Naik
2016			
2017	100%	Peningkatan	Naik

8. Indikator : Jumlah dokumen laporan semesteran barang milik daerah

Indikator ini digunakan untuk memberikan informasi tentang barang milik daerah persemester digunakan dalam rangka pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Realisasi kinerja atas indikator ini adalah sebesar 100 %. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	-		

2015	100 %	100%	Naik
2016	100%	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

Sasaran Strategis 2 : Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama : Opini pemeriksaan BPK

Target

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
WDP	WTP	WTP	WTP

Indikator opini pemeriksaan BPK ini tentang Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Badan pemeriksa keuangan dengan laporan laporan ini akan dinilai oleh badan pemeriksa keuangan apakah pemerintah daerah berhak mendapat opini WTP atau tidak, dan dua tahun berturut kabupaten Minahasa Tenggara berhasil mendapatkan opini WDP ditahun 2014, WTP ditahun 2015, tahun 2016 dan di tahun 2017 belum mendapatkan opini atas pemeriksaan laporan keuangan.

Untuk mencapai sasaran utama tersebut perlu didukung oleh indikator kegiatan sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100

2.	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100
3.	Prosentase Penyelesaian Laporan Utang dan Piutang daerah	Prosentase	100%	100%	100
4.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan LKPD	Laporan	2	2	100
Rata-rata capaian					100

1. Indikator kinerja : Jumlah Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Indikator ini digunakan sebagai dasar bagi Kepala Daerah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD.

Target kinerja indikator ini pada tahun 2017 tercapai, dan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100 %		
2015	100 %	tetap	tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap

2017	100%	Tetap	Tetap
------	------	-------	-------

2. Indikator kinerja : Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Indikator ini digunakan untuk penjabaran pertanggungjawaban atas program-program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

Target kinerja indikator ini pada tahun 2017 tercapai, dan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

3. Indikator Kinerja : Prosentase penyelesaian laporan utang dan piutang daerah

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan untuk melihat pencapaian piutang daerah yang tertagih pada tahun 2017.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 sebesar 100 % dari target yang diharapkan yaitu sebesar 100 % sesuai dengan apa yang ditargetkan .

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100%	Tetap	tetap
2016	100%	Tetap	Tetap
2017	100%	tetap	tetap

4. Indikator kinerja : Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan LKPD

Indikator kinerja jumlah laporan keuangan akhir tahun dan LKPD dibuat sebagai laporan keuangan pemerintah daerah yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100%	Tetap	Tetap
2016	100%	Tetap	Tetap
2017	100%	tetap	tetap

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah.

Indikator kinerja utama : Aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah yang memahami aturan.

Target

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
229 Orang	229 Orang	229 Orang	229 Orang

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis ini adalah semua bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk mencapai sasaran utama diatas perlu didukung oleh indikator kegiatan sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Orang	100	100	100
2	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi , BIMTEK dan pelatihan akuntansi berbasis akrual	Orang	129	129	100
Rata-rata capaian					100

1. Indikator kinerja : Aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah tentang regulasi atau aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan dan Barang milik daerah.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 adalah 100 % dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100 %	tetap	tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

2. Indikator kinerja : Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi , BIMTEK dan pelatihan akuntansi berbasis akrual
Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah tentang system akuntansi yang berbasis akrul.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 adalah 100 % dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Table berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan/Penurunan	Naik / Turun
2014	100%		
2015	100 %	Tetap	Tetap
2016	100 %	Tetap	Tetap
2017	100%	Tetap	Tetap

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	Jumlah Buku standar biaya umum	53.000.000	52.379.000
2	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	207.100.000	175.665.750
3	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	143.661.293	140.246.350
4	Jumlah buku standar satuan harga	34.875.000	31.865.400
5	Jumlah Laporan rekonsiliasi pengadaan	50.000.000	48.749.250

	barang milik daerah		
6	Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	82.500.000	79.317.500
7	Jumlah Buku Analisa Standar belanja	125.000.000	124.577.500
8	Jumlah dokumen laporan semesteran barang milik daerah	72.625.000	46.652.125
9	Jumlah Laporan Persediaan Barang Milik Daerah	32.500.000	30.149.200
10	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	173.464.700	139.191.700
11	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	111.090.100	111.060.100
12	Prosentase Penyelesaian Laporan Utang dan Piutang daerah	42.500.000	42.094.050
13	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan LKPD	508.881.000	471.489.750
14	Aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	161.000.000	160.500.600

	daerah		
15	Aparat yang memahami sistem akuntansi berbasis akrual	263.000.000	239.285.650

BAB IV

PENUTUP

Upaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 adalah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik dan benar serta memelihara kepercayaan masyarakat yang selalu menuntut transparan.

Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil melaksanakan tugas dan kewajiban dibidang Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian indikator sasaran yang dilaksanakan dalam tahun 2017 dikategorikan **berhasil**, sehingga dengan capaian seperti itu Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil di tahun 2017 dalam menjabarkan visinya yaitu **"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN MANDIRI"**.

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan ditahun yang akan datang ada peningkatan yang lebih lagi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Terima kasih.

Ratahan, 2018

Kepala
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, MSI
Pembina Tkt. I
NIP. 19660328 199403 1005